

**POLITICAL WILL PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIRDALAM  
PEMBANGUNAN JALAN LINTAS KUBU KABUPATENROKAN HILIR TAHUN 2016-  
2020**

**Oleh: Zahwa Juwita**

*e-Mail:* [zahwa.juwita1407@student.unri.ac.id](mailto:zahwa.juwita1407@student.unri.ac.id)

**Pembimbing : Tito Handoko, S.IP, M.SI**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*Development plays an important role as one of the driving forces for economic growth. Road construction is indispensable as is road infrastructure. In terms of development, in order to achieve equitable development, the Government's Political Will is an important thing needed by every leader of a region in realizing common goals for the benefit of the wider community. The problem of this research is that the development goals are not realized which are not in line with the Political Will of the Rokan Hilir Regency government in the construction of the Kubu crossing, Rokan Hilir Regency.*

*This study generally aims to find out a real picture of how the Government's Political Will in the construction of the Kubu crossing in Rokan Hilir Regency and what are the factors inhibiting the Government in the construction of the Kubu crossing in Rokan Hilir Regency. The research approach used is a qualitative approach and descriptive research type. The location of this research was carried out in Kubu, Rokan Hilir Regency. The data collection technique was done by interview and documentation.*

*The results of this study are that the Political Will or Government commitment in the construction of the Kubu cross road is still lacking and has not been maximized where the government only makes sweet promises, which can be seen that development has not been realized and there are still many obstacles, especially the budget problem of funds and vehicles that have high potential. making the Kubu causeway damaged.*

***Keywords: Government Political Will, Development, Roadways***

## PENDAHULUAN

Jika berbicara masalah pembangunan maka kita tidak akan terlepas dari pembangunan infrastruktur, Pembangunan infrastruktur bukan sekedar modal pemerintah daerah dalam kampanye Pemilihan pemerintah daerah, tetapi juga upaya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari komitmen perbaikan ekonomi. yang mana secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan syarat perlu dalam pembangunan, tidak terkecuali pembangunan pertanian dan pedesaan<sup>1</sup>. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional yang harus terus dilanjutkan, tentunya pembangunan yang membuka akses ekonomi dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat. Beberapa orang mungkin berpendapat jika pembangunan infrastruktur tidak penting karena masih banyak rakyat yang kelaparan. Padahal, seperti diketahui, tersedianya infrastruktur yang memadai menjadi kunci untuk mempertinggi pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera antara 1014' - 2030' LU dan 100016' - 101021' BT. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km<sup>2</sup>, dimana Kecamatan Kubu merupakan kecamatan yang ibu kota kecamatan nya adalah teluk merbau dan luas wilayah 1,061.06 dan jumlah penduduknya yaitu 21,703orang<sup>2</sup>. Salah satu permasalahan yang kubu yaitu minimnya akses jalan yang baik,

pembangunan infrastruktur jalan sangat penting, bahkan menjadi kebutuhan masyarakat, Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi termasuk pembangunan jalan. Persoalan pembangunan jalan lintas masih dianggap sebagai masalah utama bagi masyarakat karena jalan merupakan fasilitas penting bagi manusia agar dapat mencapai suatu daerah yang ingin dicapai. Berbagai masalah yang terjadi di masyarakat muncul berdasarkan sebab dan akibat yang terjadi, tidak terkecuali yang terjadi pada pemerintahan daerah yaitu tidak komitmen dalam pembangunan jalan lintas kubu.

Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah urusan perencanaan pembangunan dalam pasal 258 undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 3 yaitu pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Pasal 1 Ayat 4 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, mendefinisikan mengenai Jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel<sup>3</sup>.

Melihat realita jalan yang ada di kecamatan kubu kabupaten rokan hilir cukup memperhatikan. Jika melalui jalan

<sup>1</sup> Arif Satria Dkk, Menuju Desa 2030 (Bogor: Crestpent Press, 2011), h. 232.

<sup>2</sup> Rohil dalam angka

<sup>3</sup> Lihat: Pasal 1 Ayat 4 UU No. 38 Tahun 2004

dikubu maka terlihat adanya kerusakan disepanjang badan jalan, terlebih lagi banyak warga yang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah, sehingga saat hujan menjadi becek dan licin serta sulit dilalui kendaraan bermotor roda dua dan empat.

Hal ini menuai tanggapan masyarakat sekitar, maupun para pengendara yang melintasi jalan tersebut Salah satu penghulu sungai segajah jaya (salman S.Sos) mengatakan bahwa :

“sekarang jalan lintas kubu babussalam rusak parah, banyak mobil yang terpuruk, dan jalan ini satu satunya urat nadi bagi masyarakat, kita berharap jalan ini bisa dilakukan perbaikan supaya akses masyarakat tidak terhambat.” Sabtu (15/12/2019)<sup>4</sup>.

Masyarakat beranggapan bahwa pemerintahan kabupaten rokan hilir tidak serius dalam melakukan pembangunan jalan lintas. Bagaimana tidak, pemerintah daerah merupakan elemen dasar bagi terbentuknya suatu sistem dan tata kelola untuk membangun suatu wilayah. Pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bertanggung jawab atas pembangun disuatu daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Semestinya masyarakat dapat menggunakan akses jalan yang baik guna mempermudah pengendara roda dua maupun roda empat yang melintas. Selain itu juga akan

<sup>4</sup>[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrXhSSx8pNeIVQAYxT3RQx.; ylu=X3oDMTByajVjNzRjBGNvbG8Dc2czBHBvcwM0BHZ0aWQDBHNIYwNzcg--/RV=2/RE=1586783025/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.halloriau.com%2fread-rohil-124687-2020-01-22-tak-kunjung-selesai-dibangun-jalan-lintas-kubu-rohil-hanya-jadi-pemanis-janji-politik.html/RK=2/RS=rr4eHooEC15W6Rhx5YN6VI sJTxc-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrXhSSx8pNeIVQAYxT3RQx.; ylu=X3oDMTByajVjNzRjBGNvbG8Dc2czBHBvcwM0BHZ0aWQDBHNIYwNzcg--/RV=2/RE=1586783025/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.halloriau.com%2fread-rohil-124687-2020-01-22-tak-kunjung-selesai-dibangun-jalan-lintas-kubu-rohil-hanya-jadi-pemanis-janji-politik.html/RK=2/RS=rr4eHooEC15W6Rhx5YN6VI sJTxc-)

membuat para siswa menjadi mudah untuk pergi menuju kesekolah. Penulis beranggapan rusaknya jalan seringkali membuat para siswa mengalami keterlambatan serta memperlambat masyarakat menggunakan sarana kesehatan seperti mobil kesehatan. Maka dengan demikian menjadi penting bagi keberlangsungan pendidikan yang lebih baik. Hal ini menjadi indikator bagi pemerintahan kecamatan kubu untuk memperbaiki jalan tersebut. Persoalan yang mungkin timbul secara operasional adalah bagaimana komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan jalan lintas. Komitmen disini dipahami sebagai kesungguhan pemerintah terhadap masalah pembangunan yaitu dengan menempatkan masalah jalan sebagai isu sentral oleh pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan jalan sangat penting. Padahal sejak tahun 2011 sebagai pemenang pikada rohil H. Annas maamun dan H. suyatno menjadi bupati berkomitmen memprioritaskan pembangunan infrastruktur termasuk jalan lintas kubu<sup>5</sup>. tetapi nyatanya pembangunan itu pun tidak terlaksanakan. Dan pada tahun 2013 Annas maamun maju di ajang pemilihan gubernur riau sebagai gubernur riau 2013-2018. Untuk mengisi kekosongan kementerian dalam negeri menetapkan suyatno dan didampingi djamiluddin di posisi wakil bupati sebagai plt bupati rohil<sup>6</sup>. Pada masa ini suyatno juga memiliki komitmen melanjutkan program strategis dalam rencana kerja pemerintah daerah kabupaten rokan hilir yang dimana acuan tersebut sesuai dengan visi misi yang di bangun bupati sebelumnya Annas Maamun yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera aman dan berdaya saing, mengesakan pembangunan jalan di daerah

<sup>5</sup> <https://m.goriau.com/berita/baca/suyatno/-samudra-pengabdian-tak-ber tepi.html>

<sup>6</sup> Ibid

guna memudahkan akses masyarakat. sebagai contoh melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan<sup>7</sup>. Nyatanya Juga pada masa ini jalan lintas pun tidak terealisasi dilaksanakan.

Pada titik ini, *Political Will* pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur menimbulkan pertanyaan, terutama terkait dengan apa saja hambatan sehingga membuat pembangunan jalan lintas kubu tidak dilaksanakan. Persoalan yang mungkin timbul secara operasional adalah bagaimana komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan jalan lintas. *Political Will* disini dipahami sebagai komitmen atau kesungguhan pemerintah terhadap masalah pembangunan yaitu dengan menempatkan masalah jalan sebagai isu sentral oleh pemerintah kabupaten dan kota. Oleh karena itu komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan jalan sangat penting.

Berdasarkan asumsi latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut secara ilmiah dengan judul **“Political Will Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pembangunan Jalan Lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2020”**

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah, yaitu Bagaimana *Political Will* Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pembangunan Jalan Lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir? Dan Apa faktor penghambat pembangunan jalan lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya (Strauss Anselm & Juliet Corbin., 2003). Metode kualitatif ini menjadi pilihan dalam melakukan penelitian kali ini karena penulis ingin mengeksplor kajian ini lebih dalam lagi melihat realita maupun fenomena yang ada dalam kajian ini. Penelitian ini berusaha melihat fenomena yang terjadi di lapangan dan kemudian menganalisis dengan membandingkan dengan teori yang dikemukakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah urusan perencanaan pembangunan dalam pasal 258 undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 pasal 3 yaitu pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat

Berdasarkan fakta dari berita yang penulis lakukan, terlihat kerusakan jalan Kecamatan kubu kabupaten rokan hilir sebagaimana gambar pada halaman selanjutnya.

---

<sup>7</sup> <https://mediacenter.riau.go.id/read/4209/suyatno-lanjutkan-visi-annas-maamun-bangun-ro-html>

**Gambar 1.1.<sup>8</sup>**

**Kerusakan jalan yang terjadi di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir**



**Gambar 1.2.<sup>9</sup>**

**Mobil Ambulance Melewati Jalan yang Rusak**



<sup>8</sup> Melihat berita terkini dari berita <https://datariau.com/berita/Tangisan-Masyarakat-Melewati-Jalan-Lintas-Kubu-Rokan-Hilir> 8 januari 2020

<sup>9</sup> <https://www.halloriau.com/read-rohil-124687-2020-01-22-tak-kunjung-selesai-dibangun-jalan-lintas-kubu-rohil-hanya-jadi-pemanis-janji-politik.html> diakses pada tanggal 22 januari 2020.

Dari berita tersebut kondisi terparah terlihat dari kilometer nol jalan lintas Kubu lebih kurang 45 km mengalami rusak parah. Saat musim hujan tidak terlihat lagi seperti jalan, sudah sama bentuknya dengan danau dan kubangan lumpur. Padahal jalan lintas itu adalah jalan satu-satunya akses untuk keluar masuk kecamatan Kubu dan Kububassalam. Kerusakan parah ini menurut warga sudah terjadi sejak 35 tahun lebih. Masyarakat Kubu dan Kububassalam tidak bisa berbuat banyak, mereka selama ini masih mendapat janji-janji manis saja akan pembangunan tersebut. Akibat dari kerusakan parah ini menyulitkan masyarakat melakukan perjalanan ke kota, menghambat perekonomian juga akses pendidikan.<sup>10</sup>

Hal di atas membuktikan bahwa infrastruktur jalan yang rusak menjadi ancaman bagi masyarakat di kecamatan kubu. Sebagai salah satu badan pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan fisik tentulah Dinas Pekerjaan Umum (PU) memiliki peran yang sangat sentral dan sangat penting, namun pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) kabupaten rokan hilir dalam pembangunan fisik infrastruktur jalan belum terlaksana.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, infrastruktur dalam lingkup pekerjaan umum meliputi infrastruktur jalan, sebagai prasarana distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai prasarana pembentuk struktur ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Infrastruktur adalah modal esensial

<sup>10</sup> <https://www.halloriau.com/read-rohil-124687-2020-01-22-tak-kunjung-selesai-dibangun-jalan-lintas-kubu-rohil-hanya-jadi-pemanis-janji-politik.html> diakses pada tanggal 22 januari 2020.

masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, social budaya , dan kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah yang ada di Indonesia Infrastruktur, yang sering disebut pula prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. *Political Will* pemerintah yang merupakan kemauan Pemerintah atau harapan pemerintah sebagai suatu tindakan dalam kegiatan yang melibatkan publik, masyarakat, baik dalam suatu organisasi masa maupun politik bertumpu kepada etika yang berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-undang dasar.

#### **A. Inisiatif Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pembangunan Jalan Lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2020.**

Inisiatif Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui berbagai program realnya untuk pembangunan jalan lintas Kubu memang ada inisiatif untuk membangun jalan lintas Kubu. Hal ini terdapat dari jawaban dari informan Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hilir. Hasil wawancara penulis dengan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bapak Joko Sulistiono, SIP yang menuturkan :

*“Pemerintah memang berinisiatif membangun jalan lintas Kubu setiap tahunnya secara bertahap. buktinya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memerintahkan PUPR untuk menimbun badan jalan yang bergelombang agar truk-truk yang lewat tidak terpuruk.tetapi karena anggarannya yang sangat banyak dan belum tercukupi sehingga jalan itu belum selesai di bangun”.*

Inisiatif pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pelaksanaan pembangunan jalan lintas Kubu menunjukkan adanya selaku pihak pemerintah yang memiliki inisiatif untuk merealisasikan jalan lintas Kubu. Mereka meyakini bahwa inisiatifnya akan terlaksanakan untuk pembangunan tersebut dengan efektif dan efisien. Untuk melaksanakan berbagai inisiatif pemerintah, ini menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten yaitu Keterbatasan dana menyebabkan anggaran untuk pembangunan jalan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten rokan hilir kurang peduli dalam pembangunan jalan lintas kubu kabupaten rokan hilir. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat daerah lainnya, kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah daerah.

#### **B. Prioritas Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pembangunan Jalan Lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2020.**

Hasil penelitian menunjukkan pembangunan jalan lintas Kubu merupakan salah satu program yang diprioritaskan oleh pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi dasar dinas PUPR dalam penyusunan Renstra tahun 2016- 2021. Program pembangunan jalan lintas Kubu sudah menjadi program prioritas yang dapat dilihat dari SKPD tahun 2014 Akan tetapi prioritas Pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah untuk pembangunan jalan lintas Kubu belum ada dikarenakan belum adanya realitas pembangunan yang nyata di Kabupaten Rokan Hilir hingga sekarang. Jalan lintas Kubu selalu di imingi imingi akan dibangun dan menjadi prioritas semasa kampanye. Merujuk pada teori ini, ketika mewawancarai kepala dinas PUPR bapak Drs. Irwandi beliau mengatakan bahwa:

*“Pilihan kebijakan atau program*

*Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk pembangunan jalan lintas memang menjadi prioritas utama dikarenakan jalan lintas kubu rusak parah sudah puluhan tahun lamanya. Tetapi, untuk pembangunan jalan tidak bisa hanya di kubu saja dan harus merata disemua tempat.”*

Kebijakan pembangunan disuatu daerah seharusnya diprioritaskan oleh pemerintah lewat pembangunan yang dibiayai dari berbagai sumber pendanaan bagi anggaran belanja pembangunan termasuk APBD ataupun yang lain.

#### **C. Mobilisasi Dukungan Politik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pembangunan Jalan Lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2020.**

Untuk pembangunan jalan lintas Kubu kabupaten Rokan Hilir sendiri tidak ada dukungan politik dari manapun tetapi penulis melihat berita bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir pernah meminta bantuan kepada pihak swasta karena yang membuat jalan lintas tersebut rusak adalah akibat aktifitas angkutan buah kelapa sawit untuk dibawa ke PT tersebut. Meskipun diluar kawasan, namun jalan tersebut tempat lalu lalang truk bertonase tinggi mengangkut sawit perusahaan itu. Dalam permasalahan itu, perusahaan malah saling lempar ke Humas dan Perwakilan Perusahaan lainnya. sehingga sampai saat ini untuk dukungan apapun dan dari mana pun belum ada. Menurut kepala bagian administrasi pembangunan sekretariat daerah kabupaten rokan hilir mengatakan:

*“Tidak adanya dukungan dari manapun dikarenakan jalan lintas Kubu membutuhkan biaya yang tidak sedikit”.*

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh kepala dinas PUPR yaitu:

*“Untuk pembangunan jalan lintas Kubu ini tidak ada dukungan dari*

*manapun baik dari eksekutif maupun legislative ataupun perusahaan swastayang ada di Kubu.”*

Mobilisasi dukungan politik dalam pembangunan jalan lintas Kubu sangat diperlukan. Meskipun perkembangan daerah Kubu dari segi fisik sudah cukup berkembang tapi dari segi non fisik atau pembangunan infrastruktur masih sangat kurang.

#### **D. Mobilisasi Dukungan Politik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pembangunan Jalan Lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2020.**

Saat ini usaha yang dilakukan oleh penerintah kabupaten rokan hilir oleh penghulu Sungai Kubu bapak Bukrim yang mengatakan bahwa :

*“Saat ini pemerintah berusaha membangun jalan lintas Kubu dengan menimbun tanah merah agar masyarakat sedikit bisa melalui jalan ini. Tetapi apabila musim hujan jalanan sangat tidak bisa dilalui terlebih lagi truk-truk bermuatan tinggi yang lewat banyak yang terpuruk”.*

Sama halnya yang dikatakan kapala dinas PUPR yaitu:

*“Kami semampu mungkin menurunkan alat berat dikubu untuk perbaikan jalan. Tetapi dikarenakan jalan ini sangat banyak dana yang dikeluarkan dan tidak mencukupi untuk pembangunan ini maka kami berangsur untuk turun. Terlebih lagi jalan ini tanah gambut yang membutuhkan biaya yang banyak”.*

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurut penulis dari beberapa informan, usaha pemerintah untuk

pembangunan jalan lintas kubu hanya sebanyak 30% saja. Selain itu Pemerintah hanya memberikan janji manis saat berkampanye saja.

#### **Hambatan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pembangunan Jalan Lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir**

Dalam suatu usaha atau pembangunan pastinya akan ada hambatan untuk mencapai pembangunan jalan tersebut, tidak terkecuali jalan lintas Kubu. Dalam hal ini, adapun hambatan pembangunan jalan lintas kubu yaitu:

##### **1. Membutuhkan Anggaran Yang Sangat Besar.**

Niatan pemerintah untuk pembangunan jalan lintas Kubu antara lain dapat dilihat dari anggaran yang dialokasikan oleh masing-masing pemerintah untuk berbagai program dan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif terhadap upaya meningkatkan pembangunan jalan lintas Kubu.

##### **2. Kurangnya Komitmen Pemerintah**

Komitmen pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di daerah. Dikarenakan komitmennya pemerintah adalah harapan masyarakat. Pemerintah merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di dalam wilayahnya.

##### **3. Kendaraan Yang Melintasi Jalan**

Rusaknya jalan lintas kubu 90 % dikarenakan kendaraan bermuatan tinggi yang melintasi jalan kubu. Pada kenyataannya banyak kendaraan pengangkut hasil bumi seperti sawit yang memiliki bobot muatan lebih yang melintas. Kendaraan pengangkut seperti ini kerap

melintasi jalan tersebut. Hal ini merupakan salah satu pemicu seringnya terjadi kerusakan jalan di jalan lintas kubu. Selain itu jalan lintas kubu ini adalah tanah gambut yang mana tabah ini sangat lembut yang terlebih lagi dilintasi oleh kendaraan yang bernoatase tinggi.

#### 4. Faktor Keterbatasan APBD

Pemerintah Daerah sudah pasti mengalokasikan sejumlah dana untuk kepentingan penyelenggaraan jalan daerah, begitupun Pemerintah Daerah Kabupaten rokan hilir. Namun, mengingat begitu banyaknya ruas jalan yang harus dibangun dan diperbaiki serta kerusakan yang kerap terjadi di beberapa ruas jalan mengakibatkan timbulnya ketidakseimbangan antara alokasi dana yang diberikan dengan banyaknya jalan yang harus dibangun. Hal ini akan berujung pada lambatnya proses penyelenggaraan jalan daerah.

#### Kesimpulan

Dari penelitian ini, kesimpulan mengenai Komitmen pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari data yang diolah oleh penulis menunjukkan bahwa *Political Will* Pemerintah Daerah dalam pembangunan jalan lintas Kubu Kabupaten Rokan Hilir masih kurang, hal ini terlihat dari janji-janji manis pemerintah Kabupaten Rokan hilir kepada masyarakat.
2. *Political Will* pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk membangun jalan lintas Kubu masih banyak mengalami hambatan diantaranya yaitu membutuhkan anggaran yang sangat besar, keterbatasan APBD, dan kendaraan yang melintasi jalan adalah kendaraan yang bernoatase tinggi.
3. Untuk peran BAPEDDA dan Dinas PUPR dalam melaksanakan pembangunan jalan lintas kubu belum dapat dikatakan baik atau belum

tercapai dengan optimal tingkat pencapaian keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan pembangunan jalan maka harus adanya faktor pendukung dengan keberhasilan pembangunan.

4. Dalam pelaksanaan pembangunan belum berjalan secara maksimal seperti program perbaikan jalan yang belum menyeluruh di setiap kecamatan yang ada di Kubu. Realisasi pembangunan jalan lintas kubu mencapai 20,64% dari target 100% yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rokan Hilir.
5. Tidak berkembangnya suatu daerah disebabkan pemerintah daerah belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi tidak adanya *Political Will* pemerintah terhadap pembangunan jalan lintas kubu.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Arif Satria Dkk, 2011 Menuju Desa 2030 Bogor: Crestpent Press
- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial* . Pekanbaru: Alaf Riau.
- Djunaidi , G. &. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

##### Berita Online

[https://r.search.yahoo.com/\\_ylt=AwrXhSSx8pNeIVQAYxT3RQx.;\\_ylu=X3oDMTBYajVjNzRjBGNvbG8Dc2czBHBvcwM0BHZ0aWQDBHNIYwNzcg/RV=2/RE=1586783025/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.halloriau.com%2fread-rohil-124687-](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrXhSSx8pNeIVQAYxT3RQx.;_ylu=X3oDMTBYajVjNzRjBGNvbG8Dc2czBHBvcwM0BHZ0aWQDBHNIYwNzcg/RV=2/RE=1586783025/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.halloriau.com%2fread-rohil-124687-)

[2020-01-22-tak-kunjung-selesai-dibangun-jalan-lintas-kubu-rohil-hanya-jadi-jadi-pemanis-janji-politik.html/RK=2/RS=rr4eHooEC15W6Rhx5YN6VIsJTxc-](https://www.halloriau.com/read-rohil-124687-2020-01-22-tak-kunjung-selesai-dibangun-jalan-lintas-kubu-rohil-hanya-jadi-jadi-pemanis-janji-politik.html) Akses pada pada 30 maret 2020 20:44 Wib.

<https://m.goriau.com/berita/baca/suyatno/-samudra-pengabdian-tak-ber tepi.html>

<https://mediacenter.riau.go.id/read/4209/suyatno-lanjutkan-visi-annas-maamun-bangun-ro-html> di Akses pada pada 1 April 13.34 Wib

<https://datariau.com/berita/Tangisan-Masyarakat-Melewati-Jalan-Lintas-Kubu-Rokan-Hilir> diakses pada 8 januari 2020

<https://www.halloriau.com/read-rohil-124687-2020-01-22-tak-kunjung-selesai-dibangun-jalan-lintas-kubu-rohil-hanya-jadi-pemanis-janji-politik.html> diakses pada tanggal 22 januari 2020.

<https://www.halloriau.com/read-rohil-124687-2020-01-22-tak-kunjung-selesai-dibangun-jalan-lintas-kubu-rohil-hanya-jadi-pemanis-janji-politik.html> diakses pada tanggal 22 januari 2020.

<https://m.goriau.com/berita/baca/suyatno/-samudra-pengabdian-tak-ber tepi.html>

<https://mediacenter.riau.go.id/read/4209/suyatno-lanjutkan-visi-annas-maamun-bangun-ro-html>

Rohil dalam angka

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945,

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-undang nomor 53 tahun 1999.

undang-undang nomor 23 tahun 2014

Permendagri nomor 86 tahun 2017

UU No. 23 Tahun 2014